

Moderasi politik muhammadiyah dalam dinamika politik indonesia

Muhammad Nizar Syahroni Saputra ^{1*}, Muhammad Hayat ²

¹ Universitas Muhammadiyah Malang

² Universitas Muhammadiyah Malang

*) Corresponding Author: nizarsyah1409@gmail.com

Abstract

This study aims to analyse Muhammadiyah's political moderation in the context of contemporary Indonesian political dynamics. The background to this study stems from increasing political polarisation, the politicisation of religious identity, and the weakening of social cohesion following the 2024 general election, which threatens the stability of Indonesian democracy. Through a literature review of various scientific publications and official documents, this study explores the values, practices, challenges, and prospects of Muhammadiyah's political moderation. The results indicate that Muhammadiyah's political moderation is rooted in the principle of wasathiyah, which emphasises balance, justice, tolerance, and compassion as the embodiment of progressive Islam. In practice, Muhammadiyah displays noble politics oriented towards moral values and public interest by maintaining distance from partisan politics, playing an active role as a civil society force, and promoting transparency and the rule of law. However, Muhammadiyah also faces challenges in the form of political polarisation, digital hoaxes, and the pull of political pragmatism. On the other hand, great opportunities arise through strengthening citizens' political literacy and consistency with the values of progressive Islam. The overall findings show that Muhammadiyah's political moderation serves as an important pillar in strengthening civilised democracy and preventing extremism in Indonesia.

keywords: moderation, muhammadiyah, politics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis moderasi politik Muhammadiyah dalam konteks dinamika politik Indonesia kontemporer. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya polarisasi politik, politisasi identitas agama, dan melemahnya kohesi sosial pasca pemilihan umum 2024 yang mengancam stabilitas demokrasi Indonesia. Melalui pendekatan studi kepustakaan terhadap berbagai literatur ilmiah dan dokumen resmi, penelitian ini menggali landasan nilai, praktik, serta tantangan dan prospek moderasi politik Muhammadiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi politik Muhammadiyah berakar pada prinsip

wasathiyah yang menekankan keseimbangan, keadilan, toleransi, dan rahmah sebagai wujud aktualisasi Islam berkemajuan. Dalam praktiknya, Muhammadiyah menampilkan politik adiluhung yang berorientasi pada nilai moral dan kemaslahatan publik dengan menjaga jarak dari politik partisan, berperan aktif sebagai kekuatan civil society, serta mendorong transparansi dan supremasi hukum. Namun demikian, Muhammadiyah juga menghadapi tantangan berupa polarisasi politik, hoaks digital, dan tarikan pragmatisme politik. Di sisi lain, peluang besar muncul melalui penguatan literasi politik warga serta konsistensi pada nilai-nilai Islam berkemajuan. Keseluruhan temuan menunjukkan bahwa moderasi politik Muhammadiyah berfungsi sebagai pilar penting dalam memperkuat demokrasi berkeadaban dan mencegah ekstremisme di Indonesia.

kata kunci: moderasi, muhammadiyah, politik

1. Pendahuluan

Pasca reformsasi, demokrasi Indonesia mengalami peneguhan yang cukup besar, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan yang rumit seperti polarisasi politik, politisasi identitas agama, serta melemahnya rasa persatuan masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas negara (Jubba et al., 2022). Fenomena ini semakin terasa jelas di pemilihan umum 2024, yang ditandai dengan ketegangan politik yang semakin tinggi dan perpecahan sosial yang merusak nilai-nilai kebangsaan (Widyastuti et al., 2025). Dalam kondisi seperti itu, organisasi masyarakat sipil berbasis Islam memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi yang sehat dan inklusif (Latief & Nashir, 2020).

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan berbagai usaha sosial yang luas di bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan masyarakat serta menjadi organisasi yang sudah lama berperan penting dalam mengubah masyarakat dan memperkuat masyarakat sipil (Rizkillah et al., 2025). Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah menganut gerakan tajdid, yaitu pembaruan, dan moderasi, yang menggabungkan prinsip Islam dengan kebutuhan sosial dan politik modern (Nasir & Rijal, 2021). Komitmen Muhammadiyah terhadap prinsip Islam *rahmatan lil al-alam* dan moderasi beragama, telah berfungsi sebagai pondasi dasar dalam pelaksanaan politiknya yang mengedepankan toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap keragaman (Fitri et al., 2025).

Konsep moderasi politik yang diterapkan oleh Muhammadiyah terlihat dalam sikap organisasi yang mempertahankan jarak dari politik praktis partisan, sembari tetap berperan aktif memberikan arahan moral dan sumbangan berarti terhadap permasalahan kebangsaan (Anshori, 2020). Muhammadiyah telah berkontribusi secara signifikan dalam menyebarkan moderasi agama melalui kerjasama dengan pemerintah serta lembaga pendidikan Islam untuk mengurangi radikalisme (Qoumas et al., 2024). Pelaksanaan moderasi ini juga terlihat melalui aktivitas tabligh yang dilakukan sebagai wujud kepemimpinan profetik di ranah politik dengan menekankan pesan dakwah Islam yang membawa kasih sayang bagi seluruh alam tanpa terjun ke dalam politik partisan (Eraswati et al., 2022).

Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa dakwah Muhammadiyah pada zaman sekarang terlihat jelas mengalami pergeseran signifikan menuju platform online yang dengan sengaja ditujukan untuk menanggapi narasi ekstremisme serta mempromosikan diskursus moderasi Islam lewat berbagai saluran dakwah yang inovatif dan profesional (Huda et al., 2022). Sementara, dalam persoalan dakwah politik, Muhammadiyah mengadopsi paradigma politik profetik yang melihat politik sebagai usaha untuk pembebasan dan emansipasi sosial, bukan hanya sekadar perebutan kekuasaan (Al-Hamdi, 2022). Di sisi lain, Muhammadiyah didefinisikan sebagai kekuatan masyarakat sipil dengan jaringan kritik yang berperan dalam mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan negara (Setiadi, 2021). Walaupun kontribusi Muhammadiyah dalam moderasi keagamaan telah banyak diteliti, studi yang secara khusus dan terstruktur memetakan moderasi politik Muhammadiyah dalam konteks dinamika politik di Indonesia masih sedikit.

Maka dari itu penelitian ini memiliki tujuan untuk memetakan serta menganalisis moderasi politik Muhammadiyah dalam konteks politik di Indonesia melalui metode kajian pustaka terhadap jurnal dan dokumen ilmiah yang relevan. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dasar-dasar nilai moderasi politik Muhammadiyah, praktik moderasi yang muncul dalam berbagai fase perkembangan politik di Indonesia, serta mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi moderasi politik Muhammadiyah dalam kerangka demokrasi saat ini. Dengan mengadopsi pendekatan kajian pustaka, diharapkan penelitian ini dapat menyumbangkan kontribusi teoretis yang signifikan dalam memperkaya pemahaman mengenai landasan nilai, praktik dan tantangan moderasi politik Muhammadiyah dalam konteks demokrasi kontemporer.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan untuk menggali dan memetakan moderasi politik Muhammadiyah dalam dinamika politik Indonesia. Sumber data berupa artikel jurnal dan dokumen resmi tentang moderasi, politik, Muhammadiyah, demokrasi, peran civil society, yang diperoleh melalui penelusuran pada basis data jurnal nasional dan internasional. Pemilihan literatur didasarkan pada relevansi topik dan keterkaitan langsung dengan tema moderasi, politik, dan Muhammadiyah. Literatur yang terkumpul kemudian dibaca secara mendalam dan dianalisis untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan temuan ke dalam beberapa tema utama, seperti landasan nilai moderasi, praktik moderasi dalam konteks politik Indonesia, serta tantangan dan prospek moderasi politik Muhammadiyah.

3. Hasil dan Pembahasan

Moderasi Politik Muhammadiyah: Konsep dan Landasasn Nilai

Moderasi politik dapat dimaknai sebagai pendekatan dan praktik dalam berpolitik tengahan, menjauhi ekstremisme, menghargai konstitusi serta memprioritaskan pembicaraan dan menjunjung tinggi perdamaian untuk mengatasi konflik sosial-politik

(Jubba et al., 2022). Di tengah tipologi masyarakat Indonesia yang majemuk, moderasi politik menjadi prinsip penting untuk meredam polarisasi, mencegah radikalisme, dan menjaga stabilitas demokrasi di tengah perbedaan identitas agama, etnis, dan ideologi politik (Al-Hamdi, 2013).

Moderasi politik Muhammadiyah berakar pada konsep *wasathiyah* yang secara etimologis bermakna "jalan tengah" dan "keseimbangan". Konsep ini bersumber dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 143 yang menyebut umat Islam sebagai ummatan wasathan (umat pertengahan) yang adil. *Wasathiyah* bukan sekadar posisi netral, melainkan respons teologis terhadap ekstremisme di kedua kutub: fundamentalisme rigid dan liberalisme longgar (Alhaq et al., 2025).

Landasan teologis moderasi Muhammadiyah diperkuat oleh konsep maqashid syariah. Maqashid syariah bertujuan melindungi lima aspek fundamental: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Wahyuddin, 2020). Dalam konteks politik, maqashid syariah memberikan kerangka etis untuk menilai kebijakan publik dan praktik kenegaraan (Asmuni & Firman, 2022).

Prinsip-prinsip operasional moderasi Muhammadiyah dijabarkan dalam enam nilai utama: *tawazun* (keseimbangan), *tasamuh* (toleransi), *i'tidal* (keadilan), *syura* (musyawarah), *i'tikad* (keyakinan terbuka), dan *rahmah* (kasih sayang) (Lorinda, 2022). *Al-wasathiyah* tidak menolak tradisi keagamaan seperti kaum konservatif, namun juga tidak menafikan pentingnya ijtihad seperti kaum liberal. Pendekatan ini mendorong umat untuk memahami agama secara kontekstual, proporsional, dan mendalam dengan tetap berpijak pada nilai-nilai universal Islam (Alhaq et al., 2025).

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam berkemajuan memosisikan moderasi bukan hanya sebagai sikap reaktif terhadap ancaman ekstremisme, tetapi juga sebagai konstruksi proaktif dalam membangun wacana dan praktik Islam yang rasional, inklusif, dan demokratis (Syafi'i & Gharamaleki, 2023). Titik temu antara moderasi dan politik Muhammadiyah terletak pada pemahaman bahwa politik adalah sarana (*wasilah*), bukan tujuan akhir (*ghayah*) (Muhammadiyah, 2019). Politik yang dikembangkan Muhammadiyah adalah *high politics* atau "politik adiluhung", yaitu politik moral-etis yang tidak berorientasi pada perebutan kekuasaan (Anwar, 2023).

Gagasan *high politics* diterjemahkan sebagai sikap politik yang luhur dan berdimensi moral-etis. Muhammadiyah sebagai kekuatan civil society harus tegas terhadap korupsi serta mengajak masyarakat luas memerangi ketidakadilan. *High politics* ingin melandasi setiap aktivitas bernuansa politik dengan etika pemahaman keagamaan yang luhur.

Khittah Ujung Pandang (1971) menetapkan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki hubungan organisatoris dengan partai politik manapun. Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar sesuai konstitusi. Ijtihad Muhammadiyah untuk tidak terlibat politik praktis berlandaskan keyakinan bahwa dalam Islam tidak ada sistem politik yang tunggal dan absolut (Muhammadiyah, 2023a).

Meskipun demikian, Muhammadiyah justru mendorong kader-kadernya aktif di berbagai lembaga negara dan partai politik dengan membawa integritas dan visi kemuhammadiyah (Muhammadiyah, 2023b). Sebagai kekuatan civil society, Muhammadiyah mewujudkan moderasi politiknya melalui fungsi kontrol sosial dan kritik konstruktif (Walinegoro & Widodo, 2022). Kontribusi politiknya adalah politik nilai yang berpihak pada kepentingan rakyat (mustadh'afin) tanpa memiliki tendensi kekuasaan (Syahputra, 2014).

Muhammadiyah berperan melalui pendidikan politik, penguatan masyarakat sipil, dan advokasi kebijakan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Organisasi ini aktif dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum (Zahroni et al., 2025). Muhammadiyah juga bertindak sebagai mediator dalam konflik sosial dan menyediakan layanan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat (Aji Prasetyo & Etwin, 2024).

Semangat tajdid (pembaruan) menjadi karakter progresif yang melandasi moderasi politik Muhammadiyah. Islam Berkemajuan menekankan pentingnya memahami Islam sebagai agama yang fleksibel dan dinamis, tidak terkungkung oleh pandangan yang kaku dan statis. Tajdid adalah cara Muhammadiyah menjawab tantangan zaman yang terus berubah dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam yang autentik.

Dengan demikian, moderasi politik Muhammadiyah bukan hanya filosofi abstrak, melainkan gerakan sosial transformatif. Moderasi mengintegrasikan nilai-nilai Islam universal dengan prinsip-prinsip kebangsaan Indonesia. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkemajuan (*khairu ummah*).

Praktik Moderasi Politik Muhammadiyah dalam Dinamika Indonesia

A. Sikap Muhammadiyah dalam pemilu dan isu kebangsaan

Muhammadiyah menunjukkan konsistensi dalam mempraktikkan moderasi politik melalui sikap netral aktif dalam setiap pemilihan umum di Indonesia. Sejak Pilpres langsung pertama tahun 2004 hingga 2024, Muhammadiyah mempertahankan posisi politik kebangsaan (*high politics*) yang menekankan nilai moral dan etika, bukan politik kekuasaan (*low politics*) (Muttaqin, 2025). Sikap ini didasarkan pada Khittah Muhammadiyah dan Keputusan Tanwir 2012 di Bandung tentang Kristalisasi Ideologi Muhammadiyah yang menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak menempuh perjuangan politik-praktis dalam ranah kekuasaan-negara, namun proaktif menjalankan peran kebangsaan untuk memajukan kehidupan bangsa sebagai perwujudan dakwah amar ma'ruf nahi munkar.

Dalam konteks Pemilu 2024, PP Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan pers yang menyampaikan selamat kepada anggota legislatif dan Presiden-Wakil Presiden terpilih, menghormati proses sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi sebagai solusi konstitusional yang bersifat final and binding, serta mengajak masyarakat menyikapi hasil pemilu dengan arif, bijaksana, legawa, serta meminta MK bekerja lebih

profesional dan imparial dalam mengadili dan memutus sengketa pemilu demi meningkatkan kepercayaan publik (Muhammadiyah, 2024).

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir pada akhir 2024 mengeluarkan Lima Resolusi Kebangsaan untuk Indonesia yang mencakup: (1) Agama dan Moral, dalam arti menghindari politisasi agama; (2) Korupsi dan Penegakan Hukum, dalam arti mendukung pemberantasan korupsi dan KPK yang independen; (3) Konsolidasi Demokrasi Pasca Pemilu 2024, dalam arti menekankan sinergitas institusi pemerintahan; (4) Pilkada 2024, dalam arti kepala daerah terpilih harus amanah, tidak korupsi, dan tidak politik balas jasa; serta (5) Kebijakan Publik Pro-Rakyat, dalam arti setiap kebijakan harus berpihak pada kepentingan rakyat sesuai UUD 1945 (Khittah, 2024).

Konsep Darul Ahdi Wa Syahadah (negara perjanjian dan persaksian) menjadi landasan Muhammadiyah dalam memperkuat NKRI sebagai negara Pancasila yang inklusif dan berkeadilan. Pendekatan moderat dan progresif ini menempatkan Muhammadiyah sebagai organisasi reformis-modernis yang berwatak wasathiyah (moderat), tidak menghimpitkan agama dengan politik praktis namun juga tidak menjauhkan agama dari urusan negara (Supardiono et al., 2025).

Politik Alokatif, istilah yang dipopulerkan Din Syamsuddin, menggambarkan pendekatan Muhammadiyah yang mengalokasikan nilai-nilai Islam yang terintegrasi dengan keindonesiaan dan kemanusiaan semesta yang rahmatan lil-'alamin (Muttaqin, 2025). Muhammadiyah juga membebaskan warganya untuk berpartisipasi sebagai pemilih kritis, cerdas, dan menjunjung tinggi akhlak mulia, namun tidak melibatkan organisasi dalam percaturan politik praktis.

Dalam menghadapi isu kebangsaan, Muhammadiyah secara integratif memperhatikan tiga cakupan: keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Muktamar 48 di Surakarta. Muhammadiyah terlibat aktif dalam isu-isu global seperti reformasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan penanaman nilai-nilai keshalihan inklusif berdasarkan prinsip demokrasi dan keadilan sosial (Khoiruddin, 2025).

B. Peran sebagai civil society

Muhammadiyah merupakan salah satu pilar utama civil society (masyarakat sipil) di Indonesia yang memiliki otonomi dan kekuatan untuk mengimbangi dominasi negara. Civil society merujuk pada masyarakat yang terdiri dari berbagai institusi non-pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi negara tanpa mengingkari kekuasaan negara (Pratama, 2023). Sebagai kekuatan civil society, Muhammadiyah memainkan peran signifikan dalam memperkuat demokrasi, menjaga stabilitas sosial-politik, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

1) Fungsi Kontrol Sosial dan Kritik Konstruktif

Muhammadiyah menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui pengawasan kebijakan publik dan kritik konstruktif. Larry Diamond menjelaskan bahwa civil society berfungsi memberikan dasar untuk

membatasi kekuasaan negara dengan memantau dan mengendalikan kekuasaan guna mendemokratiskan negara (Asrida et al., 2021). Dalam fungsi ini, Muhammadiyah berperan mengungkap segala bentuk pelanggaran dan mendelegitimasi rezim yang tidak demokratis melalui mobilisasi kekuatan masyarakat sebagai gerakan oposisi di luar sistem pemerintahan.

Aktivitas politik Muhammadiyah yang bersifat *soft politics* mencakup menentang kebijakan yang merugikan rakyat, menanamkan rasa nasionalisme, dan mengangkat isu anti-korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kritisme Muhammadiyah terhadap pemerintah dilandasi prinsip *high politics*, yaitu politik yang berdimensi moral-etis untuk mendorong perubahan sistem politik Indonesia ke arah yang lebih demokratis, menghargai kemanusiaan, keadilan, dan keterbukaan.

2) Advokasi Kebijakan Publik dan Supremasi Hukum

Muhammadiyah aktif dalam mengadvokasi kebijakan publik yang pro-rakyat dan berpihak pada kesejahteraan sosial masyarakat, terutama bagi kelompok miskin dan marginal (Sanjaya et al., 2023). Organisasi ini sering memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan rakyat. Muhammadiyah memperjuangkan kebijakan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum dalam berbagai aspek pemerintahan (F. Achmad & Fatimah, 2025).

Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Sofyani & Tahar, 2021). Muhammadiyah mendorong pemerintah untuk menyediakan informasi yang terbuka dan dapat dipercaya kepada publik berdasarkan pertimbangan bahwa publik berhak mengetahui secara terbuka pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya. Dengan kapasitas kemandirian yang tinggi, kekuatan civil society seperti Muhammadiyah mampu menjadi kekuatan penyeimbang (*balancing force*) dari kecenderungan intervensi negara (Yanti & Giyono, 2025).

3) Mediator Konflik Sosial dan Penjaga Moderasi

Muhammadiyah memiliki peran signifikan sebagai mediator dalam konflik sosial-politik dengan pendekatan moderasi yang memungkinkan terciptanya ruang dialog inklusif di tengah perbedaan pendapat di masyarakat. Sebagai organisasi yang moderat, Muhammadiyah berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial-politik Indonesia dan memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan damai. Muhammadiyah juga berperan dalam meredakan polarisasi sosial yang sering terjadi dalam konteks politik Indonesia dengan mengedepankan dialog antarumat beragama dan antarbudaya (Wahyudi & Noorsetya, 2017).

Muhammadiyah telah mengambil cara lain berperan sebagai civil society dengan ikut secara tidak langsung dalam gerakan sosial bersama organisasi-organisasi Islam lainnya (Rustam et al., 2024). Menggunakan teori mobilisasi sumberdaya, ditemukan bahwa sumber daya Muhammadiyah termasuk para

warga, fasilitas, dan ketokohan tokoh-tokohnya juga turut menyukseskan berbagai gerakan sosial. Muhammadiyah sebagai gerakan sosial baru yang mengintegrasikan Islam dengan modernitas telah menjadi contoh sukses dari gerakan yang menerapkan pandangan kooperatif dan anti-kekerasan untuk melindungi dan meningkatkan kondisi kehidupan manusia (Idharul Haq, 2023).

Tantangan dan Prospek Moderasi Politik Muhammadiyah

A. Tantangan

1) Polarisasi politik dan politik identitas

Polarisasi politik di Indonesia mengalami peningkatan signifikan menjelang dan pasca Pemilu 2024, di mana fenomena ini tidak hanya terjadi dalam tahapan pra-pemilu tetapi berlanjut hingga periode pascapemilu sebagai akibat dari pembagian masyarakat menjadi kubu-kubu yang memiliki pandangan, ideologi, dan kepentingan politik yang berbeda secara tajam (Marlef et al., 2024). Praktik politik identitas yang menggunakan identitas sosial seperti suku, agama, dan etnisitas untuk memperoleh dukungan elektoral tanpa mempertimbangkan isu-isu substansial seperti kebijakan publik atau kinerja pemerintah telah mengancam kesatuan sosial dan kohesi nasional, serta memicu polarisasi yang mendalam antar kelompok masyarakat (Firmansyah et al., 2024). Tantangan polarisasi ini menempatkan Muhammadiyah harus menjaga netralitas institusional sambil merespons kader dan warga yang terpapar narasi politik identitas yang semakin intens di ruang publik dan media sosial.

2) Hoaks dan disinformasi di media sosial

Adapun penelitian menegaskan bahwa tantangan tata kelola digital dan polarisasi identitas yang dipicu oleh platform media sosial mengharuskan Muhammadiyah untuk tidak hanya menyuarakan moderasi secara normatif, tetapi juga mengintegrasikan etika digital dan literasi media ke dalam strategi dakwah dan pendidikan organisasi (Zhamhasari, 2025). Generasi muda Muhammadiyah, yang merupakan generasi *digital native* (Generasi Z), rentan terhadap disinformasi karena keterbatasan literasi kritis dan verifikasi informasi, sehingga penguatan civic engagement melalui pendidikan kewarganegaraan yang adaptif dan berbasis teknologi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga moderasi di ruang digital (Putri et al., 2025).

3) Tekanan pragmatisme politik dan tarikan partai terhadap kader.

Muhammadiyah menghadapi tantangan internal berupa tekanan pragmatisme politik dan upaya rekrutmen serta tarikan dari partai-partai politik terhadap kader-kader yang memiliki pengaruh dan posisi strategis dalam struktur organisasi maupun pemerintahan. Perbedaan antara aktor dan isu dalam dinamika Islam politik menciptakan variasi sikap di internal Muhammadiyah, di mana sebagian kader memandang keterlibatan politik praktis sebagai jalan untuk mewujudkan cita-cita Islam berkemajuan, sementara sebagian lain menekankan pentingnya menjaga jarak dari politik partisan demi integritas organisasi (Qodir, 2011). Studi tentang hubungan religi dan populisme pro-

kekerasan di Indonesia juga menunjukkan bahwa kelompok-kelompok Islam yang semakin bergantung pada konsep *religio-civilizational* dalam identitas nasional cenderung menjadi lebih transnasional dalam pandangan dan organisasi mereka, yang berarti kader Muhammadiyah yang terlibat di partai politik dapat terbawa arus wacana populis yang bertentangan dengan nilai-nilai moderasi dan kebangsaan organisasi (Barton et al., 2021).

B. Peluang

1) Penguatan literasi politik warga dan pemuda Muhammadiyah.

Penguatan literasi politik warga dan pemuda Muhammadiyah menjadi peluang strategis untuk memastikan bahwa moderasi politik organisasi dapat diinternalisasi hingga ke level akar rumput dan generasi muda. Program sosialisasi literasi politik yang dilakukan di kampus-kampus Muhammadiyah menunjukkan bahwa mahasiswa sebagai pemilih pemula masih membutuhkan pemahaman mendalam tentang sejarah pemilu, pentingnya partisipasi politik konstruktif, serta kemampuan untuk bersikap kritis terhadap informasi politik di media sosial agar tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks atau narasi polarisasi (Widyani et al., 2024). Dengan memanfaatkan jaringan pendidikan yang luas, Muhammadiyah memiliki peluang besar untuk mengintegrasikan pendidikan literasi politik berbasis nilai-nilai Islam berkemajuan ke dalam kurikulum AIK (Al-Islam dan Kemuhammadiyahan), sehingga setiap generasi muda Muhammadiyah memiliki bekal yang kuat untuk berpartisipasi dalam politik secara etis dan moderat.

2) Konsistensi pada nilai-nilai Islam berkemajuan dan moderasi.

Konsistensi Muhammadiyah pada nilai-nilai Islam berkemajuan dan moderasi merupakan modal sosial dan ideologis yang kuat untuk mempertahankan relevansi organisasi di tengah dinamika politik Indonesia yang semakin kompleks. Pendidikan AIK yang telah lama menjadi ciri khas Muhammadiyah di seluruh jenjang pendidikan terbukti mampu membentuk karakter muslim yang terpelajar, beriman, dan memiliki kepribadian kuat yang dapat menjawab tantangan zaman, termasuk tantangan politik identitas dan ekstremisme. (A. K. Achmad, 2020).

3) Peran Muhammadiyah sebagai penyangga demokrasi berkeadaban dan pencegah ekstremisme

Peran Muhammadiyah sebagai penyangga demokrasi berkeadaban dan pencegah ekstremisme semakin relevan di tengah meningkatnya ancaman radikalisme dan polarisasi sosial-politik di Indonesia. Fenomena politik identitas di kalangan pemuda Muslim menunjukkan bahwa transformasi loyalitas simbolik terhadap figur religius menjadi mobilisasi emosional kolektif berpotensi memicu polarisasi dan konflik sosial, sehingga dibutuhkan pendekatan moderat dan reflektif seperti yang diajarkan dalam Islam Berkemajuan Muhammadiyah

yang menekankan toleransi, dialog antarumat beragama, dan literasi kritis sebagai alternatif pengelolaan politik identitas (Cahyo et al., 2025).

4. Kesimpulan

Moderasi politik Muhammadiyah merupakan formulasi praksis dari nilai-nilai Islam berkembang yang berpijak pada konsep *wasathiyah* (jalan tengah), maqashid syariah, serta prinsip high politics atau politik adiluhung yang bermoral, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Moderasi ini berfungsi tidak hanya sebagai doktrin teologis, tetapi juga sebagai strategi sosial-politik untuk menjaga keseimbangan antara agama dan negara, meneguhkan demokrasi, serta mencegah ekstremisme dan polarisasi politik di Indonesia.

Dalam praktiknya, Muhammadiyah konsisten pada landasan nilai-nilai Islam berkembang dan moderasi merupakan modal sosial dan ideologis yang kuat untuk mempertahankan relevansi organisasi di tengah dinamika politik Indonesia yang semakin kompleks. Melalui pendekatan Darul Ahdi wa Syahadah, Muhammadiyah menegaskan posisi NKRI sebagai konsensus keagamaan dan kebangsaan yang harus dijaga melalui partisipasi kritis namun independen dari politik praktis.

Sebagai elemen penting civil society, Muhammadiyah menjalankan fungsi kontrol sosial, advokasi kebijakan publik dan supremasi hukum, serta mediasi konflik sosial dan penjaga moderasi secara konstruktif. Peran ini menjadikan Muhammadiyah bukan sekadar gerakan dakwah keagamaan, tetapi juga kekuatan sosial yang mendukung *good governance*, transparansi, dan penegakan hukum. Melalui pendekatan soft politics, Muhammadiyah berkontribusi dalam memperkuat demokrasi berkeadaban dan melindungi masyarakat dari praktik kekuasaan yang menyimpang.

Namun, moderasi politik Muhammadiyah menghadapi sejumlah tantangan serius seperti polarisasi politik, politik identitas, hoaks digital, dan pragmatisme kader. Tantangan tersebut menuntut Muhammadiyah memperkuat strategi pendidikan politik dan literasi digital agar nilai-nilai keislaman moderat tidak hanya menjadi wacana elitis, tetapi membumi di kalangan warga dan generasi muda.

Ke depan, peluang besar terbuka bagi Muhammadiyah untuk memperkuat literasi politik umat, memantapkan nilai Islam berkembang, dan mengokohkan fungsi penyangga demokrasi berkeadaban. Dengan konsistensi pada prinsip moderasi dan semangat tajdid (pembaruan), Muhammadiyah berpotensi menjaga keutuhan bangsa sekaligus memperkuat peran Islam sebagai kekuatan moral dalam dinamika politik nasional yang kian kompleks.

References

- Achmad, A. K. (2020). Reaktualisasi Pendidikan Al Islam Dan Kemuhammadiyahan (AIK) Sebagai Penguat Pendidikan Karakter. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(2), 167–178. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i2.13078>
- Achmad, F., & Fatimah, N. (2025). Empowering Legal Advocacy for Social Justice in Indonesia. *Journal of Islamic and Muhammadiyah Studies*, 7(1). <https://doi.org/10.21070/jims.v7i1.1613>
- Aji Prasetyo, S., & Etwina, Z. (2024). Kontribusi Muhammadiyah Dalam Penguatan

- Demokrasi Dan Stabilitas Pemerintahan Di Indonesia. *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 2(4), 175–185. <https://doi.org/10.62083/zhy67s73>
- Al-Hamdi, R. (2013). Islam and politics: Political attitudes of the elites in Muhammadiyah 1998-2010. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 3(2), 267–290. <https://doi.org/10.18326>
- Al-Hamdi, R. (2022). CONSCIOUSNESS TO LIBERATE: In Search of the Political Paradigm of Muhammadiyah. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 5(2), 165. <https://doi.org/10.30821>
- Alhaq, D. L., Firdaus, M., & Yakub, M. (2025). Moderasi Beragama dalam Lembaga Dakwah : Perspektif Al-Washatiah terhadap Dinamika Pemikiran Keagamaan. *Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, 3(1), 1–19.
- Anshori, I. (2020). Muhammadiyah Political Theology on the Religiosity Moderation in Indonesia. *1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)*, 436, 767–770. <https://doi.org/10.2991>
- Anwar, M. K. (2023). Kajian Filosofis Konsep High Politics Amien Rais Dan Korelasinya Dengan Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar. *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 91–113. <https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i1.351>
- Asmuni, A., & Firman, A. (2022). Analisis Politik Hukum Islam Berbasis Maqoshid Syari'Ah (Studi Terhadap Konsep Anak Sah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 736–755. <https://doi.org/10.21143>
- Asrida, W., Marta, A., & Hadi, S. (2021). Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2), 26–37. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.225>
- Barton, G., Yilmaz, I., & Morieson, N. (2021). Religious and pro-violence populism in indonesia: The rise and fall of a far-right islamist civilisationist movement. *Religions*, 12(6), 1–22. <https://doi.org/10.3390/rel12060397>
- Cahyo, S. B., Sunjaya, L. R., Muizzuddin, M. S., & Radja, I. G. S. (2025). Fenomena di Kalangan Pemuda Islam yang Terlalu Meninggikan Orang yang Memiliki Kuasa atau Status Sosial Seperti Gus, Ning, Lora, dan Dampaknya dalam Politik Identitas. *JPNM: Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin*, 3(2), 1–7.
- Eraswati, R., Ervina, R., & Romelah, R. (2022). Implementation of Tabligh As Prophetic Leadership of Muhammadiyah Through Political Movement. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 3(1), 25–35. <https://doi.org/10.22219>
- Firmansyah, M. A., Rohmah, O. A. N. R., Hidayah, S. N., & Kholilurrohman. (2024). Praktik Politik Identittas Menuju Pemilu 2024 dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 4(1), 61–80.
- Fitri, A. B. M., Barizi, A., Izzuddin, A., Miftahuddin, A. H., & Huda, A. (2025). The Politics and Practice of Religious Moderation in Indonesia: A Study of the Ministry of Religious Affairs, Nahdlatul Ulama, and Muhammadiyah. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 19(2), 321–347. <https://doi.org/10.15642>

- Huda, S., Maulana Mas'udi, M., & Muthohirin, N. (2022). The Rise of Muhammadiyah's Islamic Da'wah in the Contemporary Era: Transformation to Online Trend and Responses to Islamic Moderation. *Progresiva : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 11(01), 1–24. <https://doi.org/10.22219>
- Idharul Haq, A. M. (2023). Muhammadiyah Sebagai Gerakan Sosial Baru: Pendirian dan Perjuangan KH. Ahmad Dahlan dalam Konteks Modernitas dan Anti-kekerasan. *Focus*, 4(2), 121–132. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/focus>
- Jubba, H., Awang, J., Qodir, Z., Hannani, & Pabbajah, M. (2022). The Contestation Between Conservative and Moderate Muslims in Promoting Islamic Moderatism in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2116162>
- Khittah. (2024). *Lima Resolusi Muhammadiyah untuk Indonesia Jelang Tahun 2025*. Khittah.Co. <https://khittah.co/lima-resolusi-muhammadiyah-untuk-indonesia-jelang-tahun-2025/>
- Khoiruddin, A. (2025). Muhammadiyah dan Dinamika Politik Kebangsaan di Indonesia. *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 12(1), 162–177. <https://doi.org/10.51311>
- Latief, H., & Nashir, H. (2020). Local Dynamics and Global Engagements of the Islamic Modernist Movement in Contemporary Indonesia: The Case of Muhammadiyah (2000-2020). *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 290–309. <https://doi.org/10.1177>
- Lorinda, R. (2022). Muhammadiyah dan Moderatisme Islam Indonesia. *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyahan (JASIKA)*, 2(2), 81–94. <https://doi.org/10.18196>
- Marlef, A., Pratiwi, I., & Masyhuri, M. (2024). Kapita Selekta Psikologi Sosial: Menggali Akar Polarisasi Politik di Indonesia, Kekuatan atau Ancaman bagi Demokrasi Indonesia? *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 3(1), 152–162. <https://doi.org/10.57235/ijedr.v3i1.4496>
- Muhammadiyah. (2023a). *Haedar: Muhammadiyah Berpolitik Kebangsaan*. Muhammadiyah.or.Id. <https://muhammadiyah.or.id/2023/09/haedar-muhammadiyah-berpolitik-kebangsaan/>
- Muhammadiyah. (2023b). *Haedar Nashir Terangkan Posisi Muhammadiyah dalam Politik Lima Tahunan*. Muhammadiyah.or.Id. <https://muhammadiyah.or.id/2023/08/haedar-nashir-terangkan-posisi-muhammadiyah-dalam-politik-lima-tahunan/>
- Muhammadiyah. (2024). *Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Hasil Pemilu 2024*. Muhammadiyah.or.Id. <https://muhammadiyah.or.id/2024/03/ Pernyataan-pers-pp-muhammadiyah-tentang-hasil-pemilu-2024/>
- Muhammadiyah, S. (2019). *Haedar Nashir Membahas Spirit Pendidikan, Ideologi, dan Dinamika Politik Muhammadiyah*. Suara Muhammadiyah. <https://web.suaramuhammadiyah.id/2019/06/25/haedar-nashir-membahas-spirit-pendidikan-ideologi-dan-dinamika-politik-muhammadiyah/>
- Muttaqin, A. A. (2025). Sikap Muhammadiyah di tengah Kontestasi Pemilihan Presiden Pasca Orde Baru. *Indonesia Journal of Muhammadiyah Studies*, 6(1), 32–44.

- Nasir, M., & Rijal, M. K. (2021). Keeping the Middle Path: Mainstreaming Religious Moderation Through Islamic Higher Education Institutions in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 213–241. <https://doi.org/10.18326>
- Pratama, R. (2023). Organisasi Kemasyarakatan Islam dalam Mewujudkan Check and Balances Terhadap Kebijakan Pemerintah (Prespektif Undang-undang Organisasi Masyarakat. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 70–82. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v12i1.1231>
- Putri, F., Susiba, S., Andila, K., Anita, N., & Febriyanti, Q. (2025). Penguatan Civic Engagement Generasi Z melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 3(2), 167–176. <https://doi.org/10.59581/garuda.v3i2.5119>
- Qodir, Z. (2011). Public sphere contestation: Configuration of political Islam in contemporary Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 1(1), 123–149. <https://doi.org/10.18326/ijims.v1i1.123-149>
- Qoumas, Y. C., Hussain, R. B. B. M., & Rahim, R. A. B. A. (2024). The Dissemination of Religious Moderation Through the Policy of the Indonesian Ministry of Religious Affairs. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 12(1), 147–176. <https://doi.org/10.21043>
- Rizkillah, R. W., Budiman, M., Setyono, B., Sriyono, S., Danusiri, D., & Imron, A. (2025). Islamic Modernism and Civic Engagement: The Muhammadiyah Model for Global Islamic Movements. *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, 6(2), 233–255. <https://doi.org/10.55380>
- Rustam, M. B., Abdillah Subarkah, M., Andy, M., Ryandini, Y., Lestari, D., & Arini, D. A. S. (2024). The Muhammadiyah Movement in Social and Politics. *Journal of Education and Islamic Studies (JEIS)*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.62083/jpy7mz29>
- Sanjaya, F. D., Absori, A., Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2023). Muhammadiyah Organization's Advocacy in Indonesia: Perspective of Transcendental Justice. *Wisdom*, 25(1), 253–263. <https://doi.org/10.24234/wisdom.v25i1.977>
- Setiadi, O. (2021). Muhammadiyah and Civil Society: Critical Network , Patterns of Criticism , and Challenges. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 29(2), 277–296. <https://doi.org/10.21580>
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 10–25. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481>
- Supardiono, Soesilo, G. B., & Santosa, A. B. (2025). Peran Muhammadiyah Dalam Membangun Etika Politik dan Kesadaran Demokrasi Dalam Pilkada Melalui Baitul Argom. *Surya Abdimas*, 9(4), 697–708. <https://doi.org/10.37729>
- Syafi'i, A. R., & Gharamaleki, G. K. (2023). Religious Moderation in Risalah Islam Berkemajuan: A Perspective from Karl Mannheim's Sociology of Knowledge.

- Journal of Islamic Philosophy and Contemporary Thought*, 1(1), 1–25.
<https://doi.org/10.15642>
- Syahputra, H. (2014). Peran Politik Muhammadiyah Pada Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 0–30.
<https://www.academia.edu/download/62075622/108654-ID-peran-politik-muhammadiyah-tahun-2010-2020200212-129266-19zu93g.pdf>
- Wahyuddin, I. (2020). Perspektif Maqashid Syariah Untuk Pancasila: Membingkai Relasi Ideal Agama Dan Negara. *Jurnal Studi Islam*, 12(2), 253–431. <https://ejurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh>
- Wahyudi, C., & Noorsetya, B. (2017). The Power of Inclusive Interaction in Resolving The Religious Conflict (An Interactional Case of JAI, NU, and Muhammadiyah Activists in Bandung City). *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 25(2), 457. <https://doi.org/10.19105/karsa.v25i2.1414>
- Walinegoro, B. G., & Widodo, B. E. C. (2022). Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Pemilihan Umum: Peran Muhammadiyah pada Pemilihan Presiden 2019. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(2), 241–262. <https://doi.org/10.15575/jispo.v11i2.12811>
- Widyani, R., Irfan, A., Badawi, & Hartati, W. (2024). Sosialisasi Literasi Politik Dalam Menyongsong Pemilu 2024 Terhadap Pemilih Pemula di Universitas Muhammadiyah Cirebon. *Jurnal Abdisci*, 1(4), 125–131. <https://doi.org/10.62885/abdisci.v1i4.184>
- Widyastuti, U. A., Ahmed, K. A. M., Mahliatussikah, H., & Khosihan, A. (2025). The Narrative of Hope in “Suara Muhammadiyah Edisi 02/2025”: A Critical Discourse Analysis Using Van Dijk’s Approach (Narasi Harapan dalam “Suara Muhammadiyah Edisi 02/2025”: Pendekatan Wacana Kritis Van Dijk). *TABASA: Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia, Dan Pengajarannya*, 06(01), 54–75.
- Yanti, S., & Giyono, U. (2025). Peran Civil Society dalam Demokrasi Indonesia. *Jendela Hukum*, 12(1), 105–120. <https://doi.org/10.24929/jjh.v12i1.4221>
- Zahroni, A., Supriyatno, K., & Nurhakim. (2025). Muhammadiyah as a Pillar of Civil Society: The Dynamics of Indonesian National Politics In The Perspective of Dar Al Ahdi Wa Al Syahadah. *AMCA Journal of Religion and Society* /, 5(1). <https://doi.org/10.51773/ajrs.v5i1.372>
- Zhamhasari. (2025). Resilient Traditions of Islamic Thought: Navigating Religion and Politics in Indonesia’s Emerging Future. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(3).